



Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Terhadap Efektivitas Penanganan Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Palu

The Effect of Implementation of General Mining Business Management Policies on the Effectiveness of Handling Environmental Quality in the City of Palu

Imam Sofyan*, Meldi

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

ARTIKEL INFO

* Corresponding author;
imamsofyan@gmail.com

Kata Kunci:

implementasi kebijakan;
kualitas lingkungan hidup;
pertambangan batu;

policy implementation;
environmental quality;
stone mining;

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum terhadap efektivitas penanganan kualitas lingkungan hidup. Penelitian ini mengacu pada model implementasi kebijakan menurut Smith yang memiliki empat komponen yaitu idealised policy, target groups, implementing organization, dan environmental factor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yakni pengambilan data melalui kuesioner, observasi, dan wawancara. Data yang dianalisis adalah data yang diperoleh dari kuesioner penelitian kemudian dianalisis secara statistik structural equation modeling (SEM). Pada pembahasan hasil penelitian berdasarkan atas data kuesioner sekaligus data pendukung kuesioner yaitu dari hasil wawancara dan observasi. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Palu. Sedangkan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah stratified random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum secara signifikan berpengaruh terhadap efektivitas penanganan kualitas lingkungan hidup. Hal ini dapat diartikan bahwa pada prinsipnya implementasi kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai efektivitas penanganan kualitas lingkungan hidup di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

The purpose of this study was to obtain knowledge about the effect of implementing general mining business management policies on the effectiveness of handling environmental quality. This research refers to the policy implementation model according to Smith which has four components, namely idealized policy, target groups, implementing organization, and environmental factors. Data analyzed were data obtained from the research questionnaire and then statistically analyzed structural equation modeling (SEM). The unit of analysis in this study is an employee of the Department of Public Works, Energy and Mineral Resources in Palu City. The results showed that the implementation of general mining business management policies significantly influenced the effectiveness of handling environmental quality. This can be interpreted that in principle the implementation of general mining business management policies has a very important role in achieving effectiveness in handling environmental quality in Palu City, Central Sulawesi Province.

PENDAHULUAN

Kota Palu memiliki berbagai sumber daya alam seperti pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, serta pertambangan ialah pertambangan batu yang dipergunakan sebagai bahan pondasi bangunan. Sehingga Kota Palu sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tengah dikenal sebagai penghasil sekaligus pemasok batu untuk keperluan pondasi bangunan yang berkualitas.

Pemerintah Daerah Kota Palu dalam mengantisipasi berbagai potensi kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak kegiatan pertambangan batu tersebut, telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur usaha pertambangan sehingga dari usaha pertambangan diharapkan dapat memberikan keuntungan ekonomis sekaligus pula tetap mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Kebijakan tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.

Dari informasi yang diperoleh bahwa aktivitas pertambangan batu di daerah aliran sungai mengakibatkan permasalahan lingkungan hidup dalam bentuk kerusakan fisik sungai (menjadi lebar dan dasarnya dalam), kebisingan, polusi udara dan penyakit ispa, penurunan tangkapan nelayan dan lahan ternak berkurang. Disamping itu, mengakibatkan pelebaran sungai dan dasar sungai yang semakin dalam, tebing sungai dan tebing bukit yang mengapit alur sungai mudah mengalami longsor. Akibatnya bila hujan deras di hulu maka bisa terjadi aliran lumpur, dari longsor tebing tersebut. Di sisi lain, kondisi tebing yang mudah longsor telah mengikis lahan dan mengancam permukiman masyarakat. Dampak lainnya mengakibatkan degradasi lingkungan fisik yang parah, terjadi pelebaran dan pendangkalan daerah aliran sungai (DAS)¹.

Maka atas dasar kondisi tersebut di atas, muncul kepermukaan suatu pertanyaan mengapa kebijakan yang dituangkan dalam

bentuk Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 18 tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum pada tahap implementasinya tidak sesuai dengan amanah isi peraturan daerah itu sendiri. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, terdapat berbagai indikasi yang menyebabkan kurang efektifnya implementasi kebijakan tersebut.

Adapun Dinas Pekerjaan Umum, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Palu dalam menangani berbagai kasus yang berhubungan dengan pertambangan batu dan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan hidup masih kurang ditunjang oleh berbagai kelengkapan organisasi dalam melaksanakan perannya itu, seperti sumber daya manusia (SDM) yang dalam hal ini para pegawai pemerintah. Disamping itu, berbagai sumber daya lainnya yang menunjang kegiatan organisasi berupa peralatan yang diperlukan untuk memonitor kegiatan eksploitasi batu sangat minim, seperti kendaraan yang dipergunakan sebagai alat transportasi. Selain itu, upaya sosialisasi tentang kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum masih terasa kurang. Dari informasi yang diperoleh bahwa sosialisasi tentang pentingnya memiliki rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), juga masih sangat minim sehingga kondisi ini terus terjadi hingga saat ini¹.

Kurangnya dukungan partisipasi perusahaan sebagai target kebijakan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam peraturan daerah masih rendah, sehingga Dinas Pekerjaan Umum, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Palu masih terkesan bekerja sendiri dalam implementasi kebijakan tanpa adanya dukungan partisipasi aktif dari perusahaan sebagai pemegang izin. Faktor lingkungan yang turut mempengaruhi yakni faktor ekonomi yang menjadi pendorong utama pengelolaan pertambangan batu bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Juga terdapat kondisi yang masih saja terus terjadi hingga saat ini yaitu rendahnya pembinaan yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Palu tentang pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan batu dengan memperhatikan keseimbangan kondisi lingkungan hidup. Kondisi tersebut juga dapat diketahui dari laporan mengenai kondisi lingkungan hidup di daerah pertambangan batu

¹ Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Palu Tahun 2006, diterbitkan Pebruari 2007 oleh Pemerintah Daerah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

yang tidak disampaikan secara kontinu oleh perusahaan pertambangan batu dengan alasan pengisian laporan maupun pembuatan laporan yang belum diketahui.

Disamping itu Dinas Pekerjaan Umum, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Palu belum melakukan pemetaan, sehingga belum diketahui seberapa besar potensi material batu dan kerikil yang di wilayah Kota Palu. Baru dilakukan sebatas pemetaan berdasarkan potensi materialnya saja, belum pada pemetaan tentang kondisi lingkungannya, sehingga apabila ada investor yang berniat untuk melakukan aktivitas pertambangan. Barulah bersama instansi lain, seperti Bapedalda meminta kepada investor tersebut, untuk melakukan kajian dari segi lingkungan termasuk masalah sosial dan faktor masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambanganⁱⁱ.

1. Tinjauan Konseptual

Untuk memahami implementasi kebijakan dapat dilihat dari beberapa aspek, hal tersebut sebagaimana dikemukakan Anderson (1979:92-93) bahwa, "*Who is involved in policy implementation, the nature of administration process, compliance with policy and effect of implementation or policy content and impact*". Adapun Grindle (1980:7) memberikan pengertian mengenai implementasi kebijakan publik, dengan mengungkapkan bahwa, "*Implementation to be a general process of administrative action that can be investigated at the specific program level*".

Adapun Soenarko (1998:204) mengungkapkan pengertian implementasi kebijakan dengan menyatakan bahwa, "Pelaksanaan kebijakan pada dasarnya adalah merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemerintah tersebut". Sedangkan Van Meter dan Van Horn (1975:447) memberikan pengertian mengenai implementasi kebijakan dengan mengungkapkan bahwa, "*Policy implementation encompasses those actions by public and private individual (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision*". Sementara itu, dalam menyoroti implementasi kebijakan, Tangkilisan (2005:7) mengungkapkan bahwa, "Implementasi kebijakan merupakan rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan yang direspon

berupa aksi / tindakan para pelaku pembangunan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri". Adapun Smith (1973:202-205) mengemukakan bahwa,

The context of the implementation of policies – the policy relevant components which form the tension generating matrix. I wish to identify four such component which are important in the policy implementation process :

1. *The idealized policy, that is the idealized patterns of interaction that those who have defined the policy are attempting to induce.*
2. *The target groups, defined as those who are required to adopt new patterns of interaction by the policy. They are the people most directly affected by the policy and who must change to meet its demands.*
3. *The implementing organization, usually a unit of the government bureaucracy, responsible for implementation of the policy.*
4. *The environmental factor, those elements in the environment that influence or are influenced by the policy implementation. The general public and the various special interest groups are here.*

Sedangkan mengenai efektivitas secara umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil ataupun tujuan yang hendak dicapai. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan Riggs (1988:309) bahwa, "Efektivitas lebih mengacu pada jangkauan tujuan yang akan dicapai". Sedangkan Robins (1994:53) mengemukakan konsep efektivitas dengan menyatakan bahwa, "Keefektifan didefinisikan sebagai sejauhmana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya". Sementara Gibson dkk (1997:27) memberikan konsep efektivitas dengan mengungkapkan bahwa, "Yang kami artikan dengan efektivitas.....adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas". Adapun konsep efektivitas menurut Rosenblom dan Robert (2005:360) bahwa,

In this context effectiveness will focus on the process of implementation... ..the organization of the effort to implement the policy follow the principles of effective management with regard to (1) structure, (2) personnel, (3) budgeting, (4) decision making, and so on.

Sedangkan Koontz dan O'Donnell (dalam Thompson, 1990:575) mengemukakan konsep efektivitas yang menyatakan bahwa,

Suggest that the following principle determine the potential effectiveness of policies in relation to strategy implementation : (1) policies should reflect objectives, (2) policies should be consistent, (3) policies should be flexible, (4) the extent to which a policy is mandatory, (5) policies should be communication, taught and understood, (6) policies should be controlled.

Selanjutnya mengenai lingkungan hidup pada penulisan ini merupakan lingkungan yang menjadi tempat hidup manusia dan makhluk lainnya yang ada di bumi. Sebagaimana diungkapkan oleh Hadi (2005:7) bahwa, "Lingkungan adalah tempat dimana kita semua hidup". Pengertian lingkungan hidup menurut Suradinata (1998:15) bahwa, "Lingkungan alam ini berarti seluruh faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme". Sedangkan pengertian lingkungan hidup menurut Hadiwardjo (1997:106) bahwa, "Lingkungan didefinisikan sebagai keadaan sekeliling tempat organisasi beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia, dan keterkaitannya".

Interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup dilakukan secara *continue*. Namun hubungan yang dilakukan lebih banyak menguntungkan salah satu pihak saja yang dalam hal ini adalah manusia, dimana lingkungan hidup dikeruk sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata dalam bentuk pemanfaatan saja namun juga suatu upaya dalam menjaga kelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup, pemulihan pada lingkungan hidup yang

mengalami kerusakan, serta upaya penerapan kebijakan pengendalian lingkungan hidup agar ekosistem dapat terjaga keseimbangannya. Tangkilisan (2005:342-343) mengungkapkan tentang tujuan dari penanganan dampak lingkungan hidup, bahwa,

Tujuan upaya penanganan terhadap lingkungan hidup di daerah didasarkan atas prinsip pelestarian sumber daya lingkungan dan upaya memperbaiki atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dari prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan tujuan upaya penanganan dampak lingkungan, yaitu : (1) Terpeliharanya fungsi lingkungan hidup dalam usaha meningkatkan daya dukung dan daya tampung fungsi lingkungan. (2) Pengendalian dan penanggulangan pencemaran yang telah dan diperkirakan akan terjadi. (3) Memperbaiki kualitas lingkungan akibat terjadinya kerusakan sehingga dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya. (4) Peningkatan informasi tentang kuantitas dan kualitas sumberdaya alam, serta tingkat kerusakan alam dan kemampuan daya dukung alam. (5) Meningkatkan kualitas kelembagaan, sumberdaya manusia dan peranserta masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang dilakukan untuk menguji teori serta menjelaskan hubungan sebab akibat pada variabel. Adapun data penelitian diperoleh melalui kuesioner penelitian terhadap responden penelitian dan melalui wawancara yang berfungsi sebagai control information, serta melalui observasi. Sehingga data yang diperoleh dari hasil penelitian semakin lengkap. Sebelum penelitian lapangan terlebih dahulu dilakukan pilot survey untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner penelitian, dengan tujuan untuk menjamin bahwa kuesioner penelitian yang akan digunakan dalam penelitian dapat dikatakan valid dan reliabel. Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas yang kemudian diperoleh hasil bahwa kuesioner penelitian dinyatakan valid dan reliabel. Maka selanjutnya dilakukan penelitian lapangan dengan menyebarkan kuesioner penelitian kepada responden penelitian.

Data yang diperoleh dari kuesioner penelitian masih dalam bentuk data ordinal, maka data

ordinal tersebut harus diubah menjadi data interval dengan menggunakan successive interval, kemudian dianalisis secara statistik dalam bentuk Structural Equation Modeling (SEM), yang nantinya untuk menguji variabel dan hipotesis penelitian. Data yang digunakan merupakan hasil dari skala pengukuran jawaban responden pada kuesioner penelitian. Kemudian pembahasan hasil penelitian dengan penambahan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang juga dilakukan dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai data pendukung dari data kuesioner yang telah diperoleh.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil perhitungan analisis structural equation modeling (SEM) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari implementasi kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum terhadap efektivitas penanganan kualitas lingkungan hidup di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, pengaruh tersebut sebesar 0.88 atau 88 % dengan determinasi sebesar 78 %. Adapun pengaruh ini termasuk pada kategori tinggi karena lebih besar dari 0.5 sehingga perubahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum akan memberikan dampak besar terhadap efektivitas penanganan kualitas lingkungan hidup. Namun juga masih terdapat faktor lainnya yang belum diteliti sebesar 0.22 atau 22 %.

Dinas Pekerjaan Umum, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Palu dalam mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, dalam pelaksanaannya masih terjadi kurangnya pembinaan tentang pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan batu dengan turut memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Disamping itu laporan yang tidak disampaikan secara kontinu mengenai kondisi lingkungan hidup di wilayah pertambangan batu oleh perusahaan pertambangan. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Palu masih acuh.

Kebijakan yang diimplementasikan membutuhkan adanya suatu interaksi yang menjadi bagian dari sebuah proses implementasi kebijakan. Dalam hal ini, interaksi yang dilakukan akan memberikan suatu

perkembangan wawasan dan pemikiran. Sehingga melahirkan program-program mengaplikasikan kebijakan melalui proses yang bertahap dan fleksibel sehingga kebijakan mencapai sasaran. Bila hal tersebut dapat terlaksana maka dimensi idealised policy yang merupakan kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang dicita-citakan ke dalam bentuk program-program akan tercapai. Hal ini sebagaimana Winarno (2007:146) berpendapat bahwa,

Kebijakan publik – pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana – diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Dengan demikian, berbagai program bisa dikembangkan untuk merespon tujuan-tujuan kebijakan yang sama.

Adapun keberadaan program merupakan upaya mewujudkan kebijakan secara konkrit melalui implementasi kebijakan. Adanya program yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Palu dalam rencana strategis, yang mana salah satunya dalam bentuk program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan melalui kegiatan monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C dalam kerangka regulasi. Diharapkan melalui program pembinaan maka kegiatan pertambangan batu dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kebijakan.

Disamping itu keberadaan program tersebut sebagai bentuk interaksi yang terjadi dalam implementasi kebijakan merupakan interaksi yang dilakukan oleh implementator sejak tahap sosialisasi atau diperkenalkan kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum kepada pihak yang menjadi sasaran kebijakan, hingga pada tahap pembinaan dan seterusnya. Dari hal tersebut tentunya akan diketahui sejauhmana kebijakan dapat terimplementasikan, sehingga kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum dapat memberikan dampak bagi lingkungan hidup. Dalam hal ini kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum mengatur pengelolaan lingkungan hidup sekaligus dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Adanya upaya-upaya tersebut sebagai tindakan dalam implementasi kebijakan,

menyebabkan kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum diterima oleh pihak-pihak yang dijadikan sebagai sasaran.

Implementasi kebijakan tentunya memiliki target atau sasaran yang akan melaksanakan ketentuan yang ada di dalam kebijakan. Yang menjadi target dalam implementasi kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum adalah para pengusaha pemegang izin usaha pertambangan batu. Dalam kedudukannya sebagai target dari implementasi kebijakan, maka diperlukan adanya partisipasi aktif dari para pengusaha pemegang izin usaha pertambangan batu untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam kebijakan tentang usaha pertambangan umum. Agustino (2006:148) mengemukakan bahwa,

Hakekat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga. Karena itu, mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik di lapangan.

Salah satu bentuk partisipasi aktif dari perusahaan berkaitan dengan informasi mengenai lingkungan hidup untuk mengukur sejauhmana keberadaan kondisi lingkungan hidup, serta bagaimana tindakan-tindakan dini yang telah dilakukan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan bila ditemukan adanya potensi kerusakan lingkungan hidup. Jadi informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh aparaturnya maupun bagi masyarakat dan para pengusaha yang mengelola lingkungan hidup khususnya pertambangan batu.

Hingga saat ini masih sulit menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya pada pihak pengusaha untuk memperhatikan kondisi lingkungan hidup di daerah pertambangan batu tanpa adanya perhatian hingga penekanan yang serius dari Dinas Pekerjaan Umum, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Palu. Maka yang perlu diantisipasi adalah akibat yang dapat dirasakan bila kondisi lingkungan hidup tidak dapat dijaga dengan baik adalah kerusakan lingkungan hidup yang selanjutnya mengakibatkan mengecilnya sumber ekonomi.

Sebagaimana Salim (1986:6) mengemukakan bahwa,

Langkah kebijaksanaan eco-development – mengusahakan keserasian pembangunan dengan pengembangan lingkungan hidup – perlu dikembangkan. Faktor pembatas utama adalah kemampuan skill untuk melakukannya.

Untuk itu target groups yang merupakan pihak yang menerima kebijakan, sepatutnya didorong agar mematuhi ketentuan yang terdapat di dalam kebijakan, termasuk melaporkan secara keseluruhan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Bila keterbukaan tersebut dapat dilaksanakan maka menjadi bahan input bagi Dinas Pekerjaan Umum, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Palu sehingga selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Palu dapat menentukan kebijakan selanjutnya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Disinilah diperlukan adanya hubungan timbal balik yang sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Palu dan pengusaha pertambangan batu. Yang mana pengusaha pertambangan batu memerlukan dukungan Dinas Pekerjaan Umum, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Palu dalam mengembangkan usaha, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Palu memerlukan adanya informasi dari pengusaha mengenai perkembangan usaha dan kondisi lingkungan hidup di wilayah pertambangan batu.

Informasi merupakan gambaran tentang kondisi lingkungan hidup di daerah pertambangan batu sekaligus sebagai bahan dalam menentukan tindakan memperbaiki maupun menjaga kualitas lingkungan hidup. Fungsi informasi tersebut belum dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan bila belum mendapat dukungan dari perusahaan sebagai pihak yang melakukan pertambangan batu. Sebab upaya memperbaiki kualitas lingkungan hidup tersebut tentunya juga menjadi tugas pengusaha sebagai pemegang izin usaha pertambangan batu. Untuk itu tindakan yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup sangat penting bagi suksesnya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan sebab kesejahteraan masyarakat tidak dapat

dilakukan dalam waktu singkat. Oleh karena itu pembangunan terus menerus dilakukan dengan waktu yang panjang dan tak berujung, disamping itu pembangunan jangka panjang sangat membutuhkan kualitas lingkungan hidup yang selalu terjaga dengan baik. Sebagaimana Djajadiningrat dan Melia (2004:20-21) mengungkapkan bahwa,

Prinsip dasar setiap elemen pembangunan berkelanjutan dapat diuraikan menjadi empat hal, yaitu : (1) Pemerataan, yakni pembangunan berkelanjutan menjamin pemerataan dan keadilan sosial, yang mana kepedulian utama dari suatu pembangunan yang berkelanjutan adalah menjawab pertanyaan tentang pemerataan, untuk generasi masa kini dan generasi mendatang. (2) Partisipasi. (3) Keanekaragaman, yakni pembangunan berkelanjutan menghargai keanekaragaman (diversity), yang mana pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah persyaratan untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. (4) Integrasi, yakni pembangunan berkelanjutan menggunakan pendekatan integratif, yang mana pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. (5) Perspektif Jangka Panjang, yakni pembangunan berkelanjutan meminta perspektif jangka panjang, yang mana masyarakat biasanya cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan.

Selanjutnya untuk dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan kebijakan yang ada, target gorup memiliki karakter yang perlu menjadi perhatian bagi implementator agar kebijakan dapat diterima. Selain itu, sebagai penghubung antara implementator dengan target group adalah komunikasi yang dilakukan oleh implementator. Sebab diterima atau tidaknya suatu implementasi kebijakan oleh target group ditentukan melalui komunikasi yang baik dari aparatur. Tangkilisan (2003:19) mengemukakan bahwa, "Jika kebijakan harus diimplementasikan secara tepat, ukuran implementasi mesti tidak hanya diterima, namun mereka mesti juga jelas". Disamping itu minimnya sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Padahal sumber daya manusia memiliki peran penting bagi

organisasi untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan.

Walaupun organisasi memiliki sarana dan prasarana yang memadai namun tanpa adanya dukungan sumber daya manusia yang juga memadai maka akan sulit mengoperasionalkan sistem kerja dengan baik. Disamping itu minimnya sumber daya lainnya seperti transportasi sebagai peralatan penunjang pekerjaan. Hal tersebut ditambah lagi dengan minimnya sumber daya dana yang dapat digunakan sebagai penunjang pelaksanaan implementasi kebijakan. Padahal sumber daya dana turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana Tangkilisan (2003:12) mengemukakan bahwa, "Jika personalia yang bertanggungjawab dalam melaksanakan semua kebijakan kurang sumber daya untuk melakukan sebuah pekerjaan efektif, implementasi tidak akan efektif pula".

Untuk itu sumber daya yang terdapat dalam organisasi merupakan suatu kekuatan yang perlu dimiliki organisasi dan bila dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan memberikan dampak bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Dari hambatan berkaitan dengan sumber daya maka dibutuhkan kemampuan aparatur dalam memaksimalkan sumber daya yang terdapat dalam organisasi agar semua sumber daya yang dimiliki menjadi salah satu faktor penunjang implementasi kebijakan. Bila hal tersebut dapat terlaksana maka dimensi *implementing organization* yang merupakan organisasi sebagai pelaksana kebijakan akan tercapai.

Selain itu masalah dukungan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik turut berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan. Dwijowijoto (2008:456-458) menyampaikan bahwa,

Pada prinsipnya ada "empat tepat" yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan. Pertama, adalah apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Kedua, adalah tepat pelaksanaannya. Ketiga, adalah tepat target. Keempat, adalah tepat lingkungan. Keempat "tepat" tersebut masih perlu didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu dukungan politik, dukungan strategik, dan dukungan teknis.

Pada faktor ekonomi masih sebagai tujuan utama dalam pengelolaan pertambangan batu,

karena dengan adanya pertambangan batu maka diharapkan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga dengan alasan ekonomi tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Palu memberikan izin kepada perusahaan dalam pengelolaan pertambangan batu yang terkadang perusahaan pemegang izin pertambangan batu kurang memperhatikan kondisi lingkungan hidup. Tanpa disadari akibat dari rusaknya lingkungan hidup maka sangat berpotensi terjadinya bencana alam. Bila telah terjadi bencana alam maka akan membutuhkan penanganan bencana alam dan rehabilitasi dengan dana yang sangat besar.

Disamping itu lingkungan sosial juga menentukan bagi keberhasilan implementasi kebijakan sebab dalam hal ini dibutuhkan hubungan yang harmonis antara aparatur, pengusaha, dan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan batu. Serta adanya keterlibatan dari pihak legislatif dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), keterlibatan tersebut diperlukan sebagai kontrol dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, yang dilaksanakan oleh aparatur serta sejauhmana keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Sebagaimana Winarno (2007:145) berpendapat bahwa,

Implementasi sebagai suatu konsep semua kegiatan ini. Sekalipun implementasi merupakan fenomena yang kompleks, konsep itu bisa dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu dampak. Implementasi juga melibatkan sejumlah aktor, organisasi, dan teknik-teknik pengendalian.

Dari kondisi yang masih terjadi adalah adanya hubungan yang harmonis masih antara aparatur sebagai implementator dengan pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan batu, sedangkan masyarakat hanya berkedudukan sebagai tenaga kerja, sehingga terkadang muncul adanya tuntutan dari masyarakat agar tenaga kerja lokal lebih diperhatikan. Sebagaimana hasil wawancara bahwa pernah terjadi permasalahan di Watusampu yakni adanya pemblokiran karena pekerja lokal dikeluarkan. Sebab-sebab dikeluarkan tenaga kerja lokal tersebut karena pekerja tidak menepati ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan sehingga perusahaan tidak melakukan pembayaran kepada pekerja,

namun pada akhirnya mereka dipekerjakan kembali oleh pihak perusahaaniii.

Selain hal tersebut tentunya diperlukan adanya perhatian pada aspek lainnya. Sebagai wujud perhatian tersebut adanya tindakan aparatur dalam mendorong para pengusaha sebagai pemilik modal untuk lebih memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang berada di sekitar daerah pertambangan batu dengan melakukan perbaikan fasilitas umum, hingga turut membangun fasilitas umum, seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta adanya transaksi pembelian hasil usaha pertambangan batu masyarakat penambang oleh pihak pengusaha. Sebagaimana dikemukakan oleh Budihardjo dan Sudanti (1993:196-197) bahwa,

Peran manusia dalam pelestarian alam dapat ditempuh melalui lima jalur, yaitu : (1) Jalur politis yang berperan adalah kebijakan atau pemerintah, antara lain melalui wahana seperti undang-undang dan peraturan. (2) Jalur organisasi adalah pengaturan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta dan lembaga-lembaga nirlaba atau swadaya masyarakat yang bergulat dalam bidang lingkungan hidup. (3) Jalur administrasi, dipandang perlu adanya gagasan dan sikap baru, agar pengelolaan lingkungan dapat dilakukan lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu diciptakan teknik-teknik baru untuk mengukur biaya dan manfaat sosial dari prospek-prospek kepentingan umum, dan penilaian kembali secara lebih akurat area-area seperti taman, lapangan, dan ruang terbuka. (4) Jalur profesional, perlu lebih banyak diterapkan dan dikembangkan praktek-praktek rekayasa yang sudah teruji seperti irigasi intensif, pencegahan erosi tanah, penanggulangan hama dengan tanaman ganda atau campuran, peningkatan produktivitas biologis dan sebagainya. (5) Jalur ilmiah, dalam bentuk studi dan penelitian yang meluas sekaligus mendalam tentang lingkungan hidup.

Bila hal ini dapat terjalin dengan baik maka upaya menjaga keseimbangan lingkungan hidup akan tercapai sebab masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan batu yang kebanyakan juga berprofesi sebagai penambang batu tradisional akan mengalami peningkatan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan. Disamping itu masyarakat penambang dan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan

batu memiliki keterikatan emosional dengan pihak perusahaan pertambangan batu, sehingga akan menjaga keberlanjutan usaha pertambangan batu dan lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya, karena masyarakat di sekitar wilayah pertambangan batu dan masyarakat penambang batu memiliki kepentingan terhadap perusahaan pertambangan batu yang ada di wilayah mereka dan lingkungan hidup sebagai tempat mata pencaharian.

Pada sisi lain, keterlibatan masyarakat merupakan suatu bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, sebab tanpa adanya kerjasama dari masyarakat tentunya sungguh sulit menjaga kualitas lingkungan hidup. Sehingga diperlukan peran pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Palu untuk mengikutsertakan masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Dalam hal ini terdapat hubungan timbal balik antara pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Palu sebagai implementator dan masyarakat. Hal tersebut telah menjadi tuntutan dari kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum, yang mana dalam kebijakan tersebut ditekankan mengenai pengembangan masyarakat dan wilayah pertambangan.

Untuk itu *environmental factor* dalam implementasi kebijakan pada pengertian ini bukan dalam suatu pemahaman pada lingkungan hidup, namun lebih pada suatu pengertian lingkungan yang sangat berperan bagi efektifnya implementasi kebijakan. Keberadaan lingkungan dalam hal ini merupakan faktor strategis secara internal dan maupun eksternal saat proses implementasi kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum. Maka implementasi kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Palu perlu memperhatikan peran dimensi *environmental factor*. Untuk itu berbagai kendala yang terdapat pada *environmental factor* memerlukan pemikiran dan penyelesaian segera sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebagai gambaran hingga saat ini perhatian pada *environmental factor* belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut terjadi karena interaksi yang

ada di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal yang belum dilakukan dengan baik.

Adapun langkah-langkah membangun interaksi yang lebih baik pada lingkungan internal dan lingkungan eksternal dapat dilaksanakan apabila Dinas Pekerjaan Umum, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Palu dapat memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Palu serta turut memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh instansi-instansi lainnya dan mampu melakukan koordinasi sebagai upaya mensinergikan kewenangan yang dimiliki dengan kewenangan yang melekat pada instansi lainnya yang juga berpotensi menangani pertambangan batu dan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut dilakukan pada proses implementasi kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum. Koordinasi dilakukan untuk mencapai sinergi yang juga terungkap dalam bahasa daerah Kota Palu (*Suku Kaili*) disebut *nosarara nosabatutu* yang artinya bersaudara dan bersatu, yang menjadi semboyan Pemerintah Daerah Kota Palu.

Dari penelitian menunjukkan bahwa faktor koordinasi turut berperan penting, ketika Dinas Pekerjaan Umum, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Palu saat menangani proses izin pertambangan batu juga memerlukan adanya peran dari instansi lainnya. Tetapi peran tersebut masih terbatas pada hal-hal tertentu saja, seperti secara administrasi izin usaha pertambangan umum semestinya adanya rekomendasi yang menyangkut lingkungan hidup dari instansi Badan lingkungan Hidup Kota Palu. Namun yang terjadi adalah lebih banyak menggunakan tim independen di luar instansi Pemerintah Daerah Kota Palu. Dalam hal ini pada proses pembuatan *amdal* maupun pada pembuatan pengelolaan lingkungan hidup atau upaya pemantauan lingkungan hidup (*UKL/UPL*) ada keterlibatan pihak perguruan tinggi, namun keterlibatan itu tidak berlanjut pada penanganan pertambangan batu di lapangan.

Sedangkan pada pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan turut berperan pada proses awal administrasi yakni mensosialisasikan akan adanya perusahaan pertambangan batu di wilayah mereka dan selanjutnya mengumpulkan tanda tangan masyarakat sebagai bukti persetujuan masyarakat akan kehadiran

perusahaan. Sehingga adanya keterlibatan berbagai instansi yang turut menangani proses izin pertambangan batu maka untuk menangani kegiatan pertambangan batu di lapangan juga dapat dilakukan secara bersama-sama serta mencegah saling lempar tanggungjawab. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor koordinasi juga berperan dalam proses implementasi kebijakan. Sugandha (1991:12) mengemukakan peran koordinasi bahwa,

Fungsi koordinasi ini demikian pentingnya, apalagi bila administrasi harus berjalan sebagai suatu sistem, sebagai suatu kesatuan yang bulat dari bagian-bagian (sub sistem) yang saling berhubungan, saling menunjang, dan saling bergantung agar administrasi berjalan mencapai tujuannya. Pandangan seperti ini yang disebut pendekatan sistem merupakan alat dan teknik yang dapat membantu administrator.

Hal ini menunjukkan bahwa model implementasi kebijakan menurut Smith yang meliputi idealised policy, target groups, implementing organization, dan environmental factor yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga untuk mensinergikan hubungan tersebut diperlukan adanya koordinasi. Diharapkan dengan semakin terjalin sinergi di antara komponen implementasi kebijakan maka proses implementasi kebijakan tetap berada dalam keadaan yang stabil, dari keadaan yang stabil inilah dapat meminimalisir ataupun dapat mencegah potensi ketegangan yang bila terjadi akan berdampak pada proses implementasi kebijakan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

KESIMPULAN

Simpulan pada penelitian ini bahwa implementasi kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum memiliki pengaruh dan peran yang sangat penting untuk mencapai efektivitas penanganan kualitas lingkungan hidup di Kota Palu. Sehingga bila terjadi perubahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum akan berdampak terhadap efektivitas penanganan kualitas lingkungan hidup.

Untuk itu dalam implementasi kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum

memperhatikan dimensi-dimensi yang terdapat di dalamnya. Adapun dari keseluruhan dimensi yang mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum, paling dominan adalah dimensi environmental factor, artinya saat dilakukan implementasi kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum paling tercermin dari dimensi environmental factor. Sehingga dimensi environmental factor merupakan prioritas dalam implementasi kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum untuk mencapai efektivitas penanganan kualitas lingkungan hidup di Kota Palu. Disamping itu adanya aspek koordinasi yang turut dibangun bersama dimensi idealised policy, target groups, implementing organization dan environmental factor pada proses implementasi kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum. Keberadaan koordinasi untuk lebih mendorong sinergi dalam interaksi diantara dimensi implementasi kebijakan sehingga proses implementasi kebijakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sekaligus pula mencegah terjadinya disinteraksi diantara dimensi implementasi kebijakan yang mengakibatkan ketegangan pada proses implementasi kebijakan.

Selanjutnya berdasarkan kepada simpulan di atas maka konsep baru yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah "Dalam aktivitas lingkungan hidup, efektivitas penanganan kualitas lingkungan hidup tergantung pada kejelasan dan ketegasan implementasi kebijakan yang bersangkutan".

Rekomendasi

Implementasi kebijakan dengan memperhatikan dimensi idealised policy, target groups, implementing organization dan environmental factor serta perhatian pada aspek koordinasi yang berfungsi untuk lebih mendorong sinergi di antara dimensi implementasi kebijakan dapat dijadikan sebagai model alternatif.

Selain itu agar implementasi kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum dapat berjalan dengan baik maka Dinas Pekerjaan Umum, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Palu memperhatikan dimensi environmental factor. Disamping itu turut memperhatikan pula dimensi idealised policy, target groups, dan implementing organization, serta perhatian pada aspek koordinasi di antara instansi yang

berkaitan dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum.

Jika dikaitkan dengan nilai lokal di Kota Palu, terdapat ungkapan nosarara nosabatutu artinya bersaudara dan bersatu, telah menjadi semboyan Pemerintah Daerah Kota Palu. Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa sejak dahulu kearifan lokal telah memandang pentingnya aspek koordinasi demi kesatuan tindakan dari berbagai komponen. Untuk itu semboyan nosarara nosabatutu bukan hanya kearifan lokal yang diadopsi menjadi semboyan Pemerintah Daerah Kota Palu, akan tetapi secara konkrit dapat dilaksanakan dalam tugas administrasi. Selanjutnya mengingat Kota Palu juga memiliki potensi pertambangan mineral dan logam lainnya seperti emas, yang tentunya membutuhkan perhatian dan penanganan secara khusus oleh Pemerintah Daerah Kota Palu. Sebagai upaya menangani hal tersebut maka sudah semestinya dilakukan pengembangan unit kerja pertambangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu.

REFERENSI

Buku;

- Agustino, Leo, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Anderson, James E., 1979, *Public Policy Making, Secong Edition*, New York : Holt, Rinehart And Winston.
- Budihardjo, Eko dan Sudanti Hardjohubojo, 1993, *Kota Berwawasan Lingkungan*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Djajadiningrat, Surna T. dan Melia Famiola, 2004, *Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan (Eco-Industrial Park) : Fenomena Baru Dalam Membangun Industri Dan Kawasannya Demi Masa Depan Berkelanjutan*. Bandung : Rekayasa Sains.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2008, *Public Policy ; Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate – Metode Penelitian Kebijakan*, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Gibson, James L., Jhon M. Ivancevich, and James H. Donnely, Jr., 1997, *Organisasi Dan Manajemen : Perilaku, Struktur, Proses*, Alih Bahasa : Djoerban Wahid, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Grindle, Merilee S., 1980, *Politics and Policy Implementation In The Third World*, Princeton , New Jersey : Princeton University Press.
- Hadi, Sudharto P., 2005, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hadiwiardjo, Bambang H., 1997, *ISO 14001 ; Panduan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan*, Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Riggs, Fred W., 1988, *Administrasi Negara-Negara Berkembang : Teori Masyarakat Prismatic*, Diterjemahkan oleh : Tim Penerjemah Yasogama, Jakarta : Rajawali Pers.
- Robbins, Stephen P., 1994, *Teori Organisasi : Struktur, Desain, dan Aplikasi*, Alih Bahasa : Jusuf Udaya, Jakarta : Penerbit Arcan.
- Rosenblom, David H. and Robert S. Kravchuk, 2005, *Public Administration : Understanding Management, Politics, And Law In The Public Sector*, New York : The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, NY 10020.
- Salim, Emil, 1986, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta : Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Soenarko, 1998, *Public Policy ; Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Surabaya : Papyrus.
- Sugandha, Dann, 1991, *Koordinasi : Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, Jakarta : Intermedia.
- Suradinata, Ermaya, 1998, *Administrasi Lingkungan Dan Ekologi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, Bandung : Ramadhan Citra Grafika.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2003, *Implementasi Kebijakan Publik : Transformasi Pikiran George Edwards III*, Yogyakarta : Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- _____, 2005, *Kebijakan Dan Manajemen Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Lukman Offset.

Thompson, John L., 1990, *Strategic Management : Awareness and Change*, London : Chapman and Hall.

Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Yogyakarta : Media Pressindo.

Jurnal

Smith, Thomas B., 1973, *The Policy Implementation Process*, Policy Sciences 4, pp. 197 - 209., Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam - Printed in Scotland.

Van Meter, Donald and Carl E. Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework*, Departement of Political Science, Ohio State University, Administration and Society, Volume 6, Nomor 4.

Dokumen

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Palu Tahun 2006, diterbitkan Pebruari 2007 oleh Pemerintah Daerah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.

Radar Sulteng, edisi Sabtu, 17 Januari 2004 <<http://www.radarsulteng.com/berita/>> [19/8/08].

_____, edisi Rabu, 23 Juli 2007 <<http://www.radarsulteng.com/berita/>> [9/9/07].

¹ Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Palu Tahun 2006, diterbitkan Pebruari 2007 oleh Pemerintah Daerah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

¹ Radar Sulteng edisi Rabu, 23 Juli 2007 <<http://www.radarsulteng.com/berita/>> [9/9/07].

¹ Hasil wawancara di lokasi penelitian pada 20 Januari 2010
